

## A Critical View of the De Locomotief Newspaper on Laborers in Java 1864-1870

### Pandangan Kritis Koran De Locomotief Terhadap Buruh di Jawa 1864-1870

Ilah Nuridah <sup>1a</sup>(\*) Bambang Rakhmanto <sup>2b</sup>

<sup>12</sup>Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah

<sup>a</sup>*llahnuridah14@gmail.com*

<sup>b</sup>*Bambang.rakhmanto@mail.unnes.ac.id*

(\*) Corresponding Author

*llahnuridah14@gmail.com*

**How to Cite:** Ilah Nuridah. (2025) A Critical View of the De Locomotief Newspaper on Laborers in Java 1864-1870  
doi: 10.36526/js.v3i2.7131

#### Abstract

Received : 21-10-2025

Revised : 25-12-2025

Accepted : 10-01-2026

#### Keywords:

De Locomotief,  
Javanese Labore,  
Cultuurstelsel,  
Colonial Press.

This article examines the representation of labor in the newspaper De Locomotief from 1864 to 1870, when the Dutch East Indies underwent a shift from liberal agrarian policies to a system of forced cultivation. The purpose of this study is to reveal the ideological position of De Locomotief in understanding labor issues in Java and its relationship to colonial political changes at the end of the 19th century. Using the Delpher digital archive of the Koninklijke Bibliotheek as the primary source, historical methods were employed through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. To analyze the relationship between language, ideology, and power in media texts, Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis methodology was used. The research shows that De Locomotief displayed a critical attitude towards colonial policy through its reporting on labor exploitation, contract violations, inadequate wages, and the debunking of the myth of "indigenous laziness" as colonial legitimization. Unlike its contemporary colonial newspapers, such as Java-Bode and Soerabaijsch Handelsblad, De Locomotief always raised labor issues as structural problems. This study confirms that colonial media played an important role in creating critical discussions that contributed to changes in agrarian policy leading up to the enactment of the Agrarische Wet in 1870.

## PENDAHULUAN

Jawa menjadi kunci penting perekonomian bagi pemerintah kolonial yang mendatangkan banyak keuntungan bagi kas negaranya karena penerapan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dikenal sebagai *Cultuurstelsel* yang awalnya dicetuskan oleh gubernur jenderal Van den Bosch pada tahun 1830-1870. Sistem tanam paksa merupakan pengganti dari sistem sebelumnya yang dianggap gagal diterapkan di wilayah jajahan kolonial. Di Jawa, sistem tanam paksa diterapkan di daerah yang berada di bawah pemerintah kolonial, meskipun ada beberapa pengecualian wilayah. Konsekuensi yang ditanggung antara lain beban kerja petani yang meningkat secara signifikan dan kebebasan atas tanah dan waktu kerja yang semakin berkurang. Hal ini menyebabkan adanya dampak sosial-ekonomi sistem tanam paksa meluas dimana memburuknya kesejahteraan masyarakat pedesaan dan ketergantungan yang semakin dalam terhadap kolonial. (Aprilia et al., 2021).

Dampak sosial-ekonomi ini memunculkan beberapa perhatian dari berbagai kalangan, terutama media pers yang mulai berkembang sebagai saluran informasi dan wadah pembentukan opini publik. Pers pada masa ini didominasi oleh kalangan Eropa yang menggunakan pers sebagai alat komunikasi, administrasi, serta alat kontrol kepentingan pemerintah kolonial sendiri. Secara garis besar, pers di Hindia-Belanda terbagi menjadi tiga kategori: pers kolonial, pers Tionghoa, dan pers nasional. Namun, pada akhir masa tanam paksa sebagian dari media pers tersebut lebih

berfokus untuk memberitakan perdagangan, laporan resmi pemerintah, administrasi, sehingga isu-isu sosial mengenai buruh di Jawa jarang menjadi pemberitaan utama (Efendi, 2020).

Penelitian-penelitian mengenai kondisi buruh di Jawa sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Wafiyatu & Arif (2016) yang membahas transformasi sosial-ekonomi masyarakat Jawa sejak diberlakukannya *Cultuurstelsel* pada 1830 dengan menitikberatkan pada perubahan penting kehidupan agraris Jawa, yaitu tanah dan tenaga kerja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik tanam paksa hanya menambah beban kerja petani. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Syahbuddin (2018) yang pada penelitiannya menyoroti bagaimana kondisi petani dan tenaga kerja sangat memprihatinkan akibat kebijakan dari pemerintah kolonial.

Sejalan dengan kajian mengenai kondisi sosial-ekonomi tersebut, penelitian tentang dinamika pers kolonial menunjukkan peran penting media cetak dalam pembentukan opini publik. Surjomihardjo (1980) membahas perkembangan media pers di Hindia-Belanda yang sifatnya tidak sama, karena ada beberapa pers yang pro-pemerintah dan ada yang memposisikan sebagai media yang kritis. Penelitian Chaniago dan Umairah (2018) ikut menambah pembahasan mengenai pertumbuhan dan karakteristik media pers masa kolonial, khususnya pada kondisi sejarah awal munculnya koran *De Locomotief* sebagai media yang kritis dibandingkan media pers sezamannya serta penelitian Bambang Rakhmanto (2018) memberikan referensi bagaimana peran pers didalam membingkai suatu isu dan media pers digunakan sebagai sumber sejarah kajian ini menjadi rujukan dalam penulisan konseptual.

Pada periode 1864-1870 terbit berbagai media pers di Hindia-Belanda dengan berbagai orientasi politik yang beragam. Diantara media tersebut, *De Locomotief* sudah secara intens membahas mengenai kondisi buruh di Jawa, terutama terkait tanam paksa dan pekerja paksa, pelanggaran kontrak kerja, upah yang kecil dan merugikan, hingga hak-hak bagi buruh. Sikap kritis yang ditunjukkan oleh *De Locomotief* memberikan gambaran adanya perkembangan corak pemikiran liberal di kalangan pers Eropa. Oleh karena itu, *De Locomotief* mempunyai posisi yang sangat penting di dalam sejarah pers kolonial yang mengekspresikan gagasan perubahan sosial di Hindia-Belanda (Chaniago & Umairah, 2018).

Periode 1864-1870 merupakan fase penting karena menjadi masa transisi menuju perubahan kebijakan agraria. Perdebatan mengenai *Cultuurwet* (1865-1866) dan kemudian *Agrarische Wet* (1870) menjadi titik krusial yang banyak dibahas dalam pers, termasuk *De Locomotief*. *Cultuurwet* yang diajukan Fransen Van de Putte mendorong penghapusan kerja paksa dan membuka peluang bagi perkebunan swasta, sementara *Agrarische Wet* menjadi dasar hukum yang mengatur hak guna usaha (*erfpacht*) dan pengakuan terbatas terhadap hak tanah penduduk pribumi. Dalam konteks ini, *De Locomotief* berperan sebagai media yang intens memuat isu-isu kritik eksloitasi buruh dan mengarah kearah yang liberal (Masryullahushomad & Sudrajat, 2020).

Kendatipun beberapa penelitian sudah membahas tentang dinamika pers kolonial dan kondisi sosial-ekonomi buruh di Jawa telah dilakukan, kajian-kajian ini masih memiliki keterbatasan. Penelitian Surjomiharjdo (1980) dan Chaniago & Umairah (2018) menempatkan *De Locomotief* terutama dalam konteks sejarah pers dan karakter liberal dari media kolonial, tanpa adanya analisis secara mendalam bagaimana buruh Jawa digambarkan dalam teks pemberitaan. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya lebih fokus pada posisi politik surat kabar dan bukan pada cara wacana membentuk representasi buruh.

*De Locomotief* sendiri sebagai koran berbahasa Belanda yang terbit di Semarang pada tahun 1851, dipelopori oleh E. Herman de Groot. Pada masa awal perkembangannya koran ini bernama *Semarangsche Nieuwse en Advertentieblad* kemudian namanya berganti menjadi *De Locomotief* di tahun 1864. Pergantian nama ini untuk memperingati pembangunan jalur kereta api dari Surakarta dan Yogyakarta ke Semarang dan bertepatan juga saat berdirinya Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij. Posisi *De Locomotief* yang menjadi aktor penting dalam produksi wacana kolonial, termasuk mengenai pemberitaan buruh di Jawa (Chaniago & Umairah, 2018).

Kebaruan penelitian yang terletak pada analisis mekanisme diskursif yang membentuk representasi buruh Jawa dalam surat kabar *De Locomotief*, dengan fokus kajiannya diarahkan pada pilihan dixi, pola penempatan aktor sosial, serta konstruksi buruh sebagai korban dari sistem tanam paksa ke konteks peralihan menuju kearah kebijakan yang lebih liberal. Dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Eriyanto, 2001) penelitian menunjukkan bagaimana wacana buruh digunakan sebagai instrumen ideologis untuk mengkritik pemerintah kolonial dan pengesahan perubahan dari kebijakan menjelang disahkannya Agrarische Wet 1870. Dengan latar belakang ini, pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana surat kabar *De Locomotief* secara diskursif mewakili buruh Jawa dalam konteks politik reformasi agraria kolonial dari tahun 1864 hingga 1870?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis untuk mengkaji pandangan kritis koran *De Locomotief* terhadap buruh di Jawa 1864-1870 yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Prof. Dr. Wasino, M.Hum, n.d.).

Tahap pertama adalah heuristik, yakni pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa koran *De Locomotief* edisi 1864-1870 yang diperoleh melalui arsip digital *Delpher* milik *Koninklijke Bibliotheek* (Perpustakaan Nasional Belanda). Pencarian kata kunci *arbeid*, *arbeider*, *arbeidster*, *koelie* dan tema lain terkait dengan buruh, sehingga hanya edisi-edisi yang memuat laporan, editorial, dan opini tentang buruh di Jawa yang dipilih untuk dianalisis. Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel ilmiah (Kartodirdjo, 1993).

Tahap kedua yakni kritik sumber yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan dengan tujuan menempatkannya dalam konteks ideologis dan historisnya, mencakup latar belakang redaksi, kepemilikan media, segmentasi pembaca, dan posisinya dalam jaringan ekonomi-politik kolonial Hindia-Belanda. Kritik internal dilakukan dengan pemeriksaan teks berita secara menyeluruh dilakukan untuk menunjukkan wacana mengenai buruh di Jawa. Untuk menghindari pembacaan yang ahistoris dan menerima wacana secara normatif, perbandingan dilakukan antara media sezaman dan sumber sekunder. Serta menerjemahkan isi koran dengan cara membandingkan hasil terjemahan dari Depl dan Google Translate (Kartodirdjo, 1993).

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu penafsiran fakta sejarah yang telah diverifikasi melalui kritik sumber. Pada tahap ini, penulis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough untuk mengkaji bagaimana *De Locomotief* membentuk representasi mengenai buruh di Jawa dalam bentuk kritik terhadap pemerintah kolonial dan sebagai bagian dari wacana liberal yang berkembang pada akhir masa tanam paksa. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan kembali seluruh temuan penelitian dalam narasi sejarah yang sistematis dan runut sehingga dapat dipahami oleh pembaca dan memberikan kontribusi bagi kajian sejarah pers kolonial dan sejarah sosial pekerja paksa di Jawa (Kartodirdjo, 1993).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Representasi buruh dalam *De Locomotief*

*De Locomotief* merupakan surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Semarang dan berkembang secara pesat pula semenjak adanya pergeseran namanya pada tahun 1864, bertepatan dengan menguatnya kepentingan ekonomi dan infrastruktur kolonial. Ketiadaan pesaing dari surat kabar di Semarang pada pertengahan 1860-an memberikan ruang bagi *De Locomotief* untuk menguasai produksi wacana kolonial, termasuk dalam mengangkat isu buruh. Tidak hanya dilihat sebagai peristiwa yang terjadi, buruh digambarkan sebagai subjek sosial yang mengalami ketidakadilan dari kebijakan kolonial. Melalui pilihan bahasa, struktur narasi, dan penempatan actor, *De Locomotief* membungkai persoalan buruh sebagai masalah struktural yang berakar pada sistem tanam paksa dan praktik administrasi kolonial. Pembingkaiannya ini menunjukkan adanya kritik *De*

*Locomotief* berkaitan dengan berkembangnya wacana liberal pemerintah sejak 1864 hingga tanam paksa berakhir 1870. Sehingga sikap dari redaksional surat kabar ini tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan orientasi politik kolonial yang mulai memberikan ruang bagi kritik internal (Chaniago & Umairah, 2018).

Dalam berbagai tulisan yang dimuat oleh redaksi *De Locomotief*, surat kabar ini secara konsisten mengontruksi dan memposisikan kondisi para buruh di Jawa. Pembahasan tersebut mencakup beragam persoalan, seperti upah kerja yang sangat kecil dan jauh dari layak, adanya diskriminasi hukum yang merugikan buruh, berbagai bentuk penderitaan yang dialami masyarakat pekerja, hingga hak-hak dasar yang tidak pernah di berikan kepada para buruh yang bekerja dalam sistem kerja paksa. Isu-isu ini tidak hanya dilaporkan sebagai fakta sosial, melainkan diartikan sebagai akibat langsung dari struktur kebijakan kolonial. Kritik terhadap situasi tersebut disampaikan secara terbuka oleh para redaktur, yang menuliskan laporan dan analisis dengan nada tajam terhadap kebijakan kolonial. Kritik yang dimuat oleh *De Locomotief* secara intens ini saling berkesinambungan selama enam tahun menjelang tanam paksa berakhir. Keberlanjutan kritik ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai buruh merupakan bagian dari agenda redaksional yang relatif konsisten, bukan hanya respons sesaat terhadap peristiwa tertentu. Keberanian *De Locomotief* untuk memuat berita-berita inilah yang membuatnya berbeda dengan koran-koran sezamannya yang umumnya lebih fokus pada laporan resmi pemerintah dan cenderung pro-pemerintah. Dalam konteks ini, *De Locomotief* tampil sebagai pengecualian yang secara aktif mengangkat realitas sosial-ekonomi buruh dimana sering diabaikan oleh pers kolonial lainnya. (Surjomihardjo, 1980).

Pendekatan kritis *De Locomotief* dapat dipahami melalui teori Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, yang menekankan bahwa teks media bukan sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan juga ruang produksi ideologi dan relasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, bahasa yang digunakan oleh *De Locomotief* merepresentasikan posisi redaksional yang relatif berseberangan dengan pemerintah kolonial, khususnya dalam isu perburuhan. Pilihan kosakata, cara membingkai peristiwa, serta penekanan pada penderitaan buruh berfungsi untuk membangun sebuah wacana moral yang menempatkan buruh sebagai korban sistem tanam paksa. Representasi tersebut memperlihatkan kritik terhadap praktik eksloitasi yang dibenarkan oleh pemerintah kolonial. (Eriyanto, 2001).

Melalui perspektif Analisis Wacana Kritis, surat kabar *De Locomotief* merupakan media yang menunjukkan oposisi terbatas terhadap pemerintah kolonial pada masa itu. Hal ini terlihat dari intensitas pemberitaan mengenai masyarakat yang bekerja sebagai buruh tanam paksa. Pemberitaan *De Locomotief* mencakup mengenai buruh pekerja tanam paksa dibayar tidak sepadan, penyuaraan hak-hak buruh tanam paksa, kondisi buruh tanam paksa serta kritik mengenai sistem tanam paksa yang dianggap merugikan masyarakat bumiputera. Wacana ini secara implisit mempertanyakan legitimasi kolonial yang bersandar pada eksloitasi tenaga kerja bumiputera.

Kritik terhadap praktik tanam paksa secara jelas tercermin dalam pemberitaan *De Locomotief*. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam edisi 27 Desember 1864 melalui artikel berjudul “*Een Snuifje Voor Sucram*”. Dalam tulisan tersebut, redaksi *De Locomotief* mengkritik pandangan seorang tokoh bernama Sucram yang berupaya membenarkan sistem kerja paksa, penyerahan tanah, serta aturan baru penanaman tebu dengan menggunakan logika ekonomi. Pendapat mengenai ekonomi oleh redaksi *De Locomotief* ini dibingkai sebagai legitimasi ideologis yang menyesatkan dan menutupi eksloitasi buruh. Penulis opini tersebut menegaskan bahwa reformasi yang diklaim sebagai langkah “liberal” pada dasarnya tidak menghapus praktik eksloitasi, melainkan justru melanggengkan penderitaan rakyat Jawa (*De Locomotief*, 27 Desember 1864, n.d.)

“dat het wezen der nieuwe regeling de voortduring is van de onder het stelsel tot heden bestaan hebbende grondslagen, namelijk de voortduring der verplichte afgifte van grond en van den dwangarbeid aan de inlanders opgelgd, die als tegenprestatie voor de te

*hunnen bate-benutting gegeven beschikking over de tuinen van inlandsche ingezeten worden gesupponeerd”*

(Bahwa esensi dari peraturan baru ini adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip yang telah berlaku di bawah sistem yang ada hingga saat ini, yaitu kelanjutan dari kewajiban menyerahkan tanah dan kerja paksa yang dikenakan kepada penduduk asli, yang dianggap sebagai imbalan atas pemberian hak penggunaan kebun-kebun penduduk asli untuk kepentingan mereka).

Pilihan bahasa seperti “*Voortduring der verplichte afgifte van ground*” dan “*dwangarbeid*” memperlihatkan jikalau *De Locomotief* secara sadar menekankan kontinuitas penindasan, bukan perubahan dan wacana reformasi kolonial dibongkar sebagai ilusi semata, sementara eksplorasi dipresentasikan sebagai praktik struktural yang berlanjut.

### **Wacana buruh dan transisi kebijakan agraria 1864-1870**

Memasuki tahun 1865 sampai 1867 terjadi banyak pembahasan mengenai *Cultuurwet* (UU mengenai Usaha Pertanian) yang sebelumnya pada tahun 1865 diajukan oleh tokoh liberal (menteri jajahan kolonial) yang mengurus perdagangan pihak swasta yaitu Fransen Van de Putte dimana *Fransen* ingin membuat sebuah undang-undang agar mempermudah usaha perkebunan swasta di Hindia-Belanda berkembang. Langkah yang *Fransen* ambil yaitu menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur tanah perkebunan dan pertanian di Parlemen Belanda (Arizona, 2014). Undang-undang yang diajukan oleh *Fransen Van de Putte* tersebut menyatakan bahwa: (1) Gubernur Jenderal harus memberikan hak erfpacht atau hak guna usaha selama 99 tahun, (2) Hak kepemilikan tanah penduduk pribumi diakui sebagai hak penuh atau eigendom, dan (3) Tanah komunal diubah menjadi hak milik individu dengan status eigendom (Masrullahushomad & Sudrajat, 2020).

Hal-hal mengenai isu *Cultuurwet* ini banyak dimuat oleh pers masa itu dimana di tahun 1865-1867 Pada edisi koran *De Locomotief* 21 Juli 1865 yang berjudul “*Heredienstpligtigheid*” yang artinya “Wajib Militer”. Isi koran ini adalah dimana penulis membandingkan antara perbudakan dan kerja paksa dimana menurutnya perbudakan adalah salah satu kutukan terbesar umat manusia dan tidak ada keadaan yang lebih baik dibanding ketika manusia menjadi barang milik manusia lainnya yang artinya disamakan dengan anjing, kuda, atau ternak. Kemudian penulis menyebutkan ada hal yang paling menyakitkan yaitu dimana seorang pribumi yang lahir bebas dipaksa bekerja sebagai kuli bagi para pejabat. (*De Locomotief*, 21 Juli 1865, n.d.)

*“Zeker niet! Maar dit is ook pijnlijk, dat een vrij gebo-rene gedwongen wordt, om ambtenaren en ambtenaartjes, onder den naam van Heerendienst, als koelie te dienen en het misbruik, dat dienaangaande wel eens van Heeren-dienst werd gemaakt, is even drukkend als de vroegere slavernij, op Java, zoo niet drukkender”*

“Tentu saja tidak! Namun, hal ini juga menyedihkan, bahwa seorang yang lahir bebas dipaksa untuk melayani pejabat dan pegawai negeri, dengan dalih pelayanan kepada tuan, sebagai buruh kasar, dan penyalahgunaan yang pernah dilakukan dalam hal ini sama menekan seperti perbudakan di Jawa, jika tidak lebih menekan”

Penulis menyebutkan jika perbudakan di masa dulu antara tuan dan budak masih ada hubungan timbal balik misalnya budak mempunyai tugas-tugas tertentu dan tuannya memberi makan,pakaian,tempat tinggal,uang sirih,dan sedikit perawatan bahkan ada beberapa budak yang dianggap sebagai keluarga tuannya. Akan tetapi, pada kerja paksa orang jawa penuh dengan kesewenang-wenangan. Buruh kerja paksa menjadi mangsa penipuan,pemerasan dan praktik eksplotasi. Misalnya, para pekerja paksa meninggalkan keluarga selama 52-73 hari bekerja tanpa upah bagi para pejabat dari mulai *Regent*, *Wedana*, *Mantri polisi*, hingga *Controleur*. Adapun tugas mereka adalah hari ini memotong rumput untuk regent, besok ia harus menggembalaan kerbau wedana,lalu menjadi penjaga kuda, menjadi tukang air *controleur*, terkadang menjadi pembantu dapur Asisten Residen, memperbaiki jembatan serta menggarap sawah yang sebenarnya dimiliki

oleh saudara-saudara pejabat. Penulis dalam tulisannya mengecam bahwa sistem *Herendiest* (Kerja Paksa) membuat orang Jawa tetap miskin. keadaan ini sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Penulis juga mengungkapkan harapannya untuk kemenangan kelompok liberal terutama pada kebijakan yang diusung oleh Fransen Van de Putte yaitu *Cultuurwet* akan menghapus kerja paksa, melawan kelompok konservatif serta membawa kesejahteraan bagi Jawa dan Belanda. (*De Locomotief*, 21 Juli 1865, n.d.)

Namun, rancangan undang-undang tersebut mendapatkan kritik dari kaum liberal sendiri yaitu Johan Rudolf Thorbecke. Hal ini menyebabkan dua kubu dari kaum liberal terpecah menjadi dua yaitu pendukung Fransen dan Thorbecke yang merasa bahwa *Cultuurwet* tidak benar-benar liberal dan justru sangat lemah. *Cultuurwet* dianggap mempertahankan kekacauan lama dan gagal menghadirkan perubahan sosial besar yang sangat dibutuhkan di Hindia-Belanda. Pasal-pasal tentang kepemilikan tanah individu, erfpacht, serta pengaturan kopi dianggap masih memberi ruang sangat besar terhadap kesewenang-wenangan dan tidak menjamin penduduk Jawa (*De Locomotief*, 16 Januari 1866, n.d.) dan menganggap bahwa Fransen dianggap tidak cakap dan tidak bijaksana (*De Locomotief*, 2 Juli 1867, n.d.). Selain itu, penolakan juga datang dari parlemen pemerintah yang berujung pada jatuhnya Fransen Van de Putte dari jabatannya karena ia dinilai terlalu cepat memberikan hak kepemilikan tanah mutlak kepada pribumi. Akibatnya, keinginan kelompok swasta Belanda untuk menanamkan modal secara luas dalam sektor pertanian di Hindia-Belanda belum bisa terwujud. (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2020)

Dalam pemberitaan pers tahun 1869-1870 terjadi gejolak mengenai *Agrarische Wet* dan *Suikkercultuur* (kultur gula) yang menjadi pembaharuan dari *Cultuurwet* yang diklaim pemerintah bahwa reformasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kolonial yang dianggap bahwa kepentingan yang terlibat sangat banyak dan bahkan saling bertentangan, sehingga usaha untuk menciptakan kebijakan yang adil menjadi sangat sulit. Rancangan terbaru ini ternyata tidak lebih berbeda dari yang lama, meskipun sedikit lebih liberal dari sistem sebelumnya yang tetap mengutamakan kepentingan kas negara di atas kepentingan penduduk Jawa (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2020)

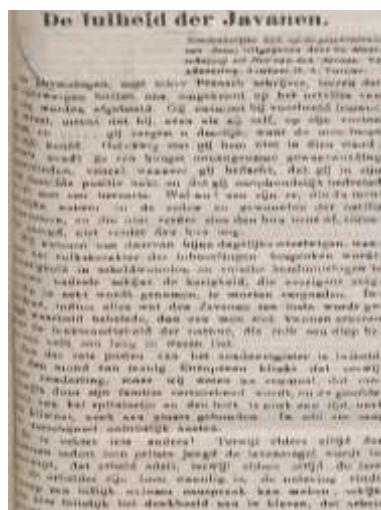
Kritik keras terhadap sistem tanam paksa gula terus digaungkan oleh koran *De Locomotief* yang menganggap bahwa tanam paksa gula adalah suatu ketidakadilan dan menolak Kamar Dagang Batavia, Semarang, dan Surabaya yang mengatakan bahwa *Cultuurstsel* dianggap cocok dengan masyarakat di Jawa, padahal *Cultuurstsel* bukanlah adat Jawa yang menjadi dasar utamanya melainkan dasarnya adalah kepatuhan yang terpaksa oleh rakyat dan kekerasan oleh penguasa. *Cultuurstsel* dianggap sebagai sistem warisan dari VOC yang digunakan sebagai alat eksplorasi kolonial dan sistem yang disebut hanya memiliki satu manfaat yaitu memeringankan kas negara meskipun merusak rakyat Jawa. Alasan ini dianggap tidak bermoral karena sistem ini kedepannya akan menambah utang moral Belanda, melemahkan kewibawaan pemerintah dan menanam benih perlawanan di masa depan. tidak hanya tanaman gula, tanaman kopi juga dianggap akan membawa kekhawatiran jika reformasi terlambat dilaksanakan karena akan menimbulkan kebencian mendalam dari rakyat dan menghambat lahirnya industri gula yang bebas (*De Locomotief*, 21 Desember 1869, n.d.)

Pada tahun 1870 menteri jajahan kolonial saat De Waal saat itu mengajukan RUU ke parlemen yang terdiri lima ayat yang pada akhirnya ditambah menjadi tiga ayat dengan total delapan ayat. *Agrarische Wet* sendiri lahir dikarenakan adanya kritik terhadap *Cultuurstsel* dan juga desakan dari pemodal swasta, isi dari *Agrarische Wet* secara garis besar adalah larangan gubernur jenderal menjual tanah termasuk tanah kecil untuk kota dan desa untuk mendirikan perusahaan dan bangunan, gubernur jenderal juga dapat menyewakan tanah yang sudah diatur di dalam undang-undang kecuali tanah yang telah dipergunakan untuk keperluan umum, memberikan tanah dengan hak milik turun-temurun selama 75 tahun, gubernur jenderal memastikan pemberian tanah tidak melanggar hak-hak rakyat dan tidak diperbolehkan mengambil tanah rakyat untuk kepentingan pribadi atau keperluan lain kecuali kepentingan perkebunan dengan pemberian uang ganti rugi

rakyat, tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat dapat di berikan hal eigendom dengan syarat yang telah ditetapkan di undang-undang dan harus tercantum dalam surat tanda eigendom mengenai kewajiban pemilik tanah terhadap negara dan desa dan hak menjual, serta penyewaan tanah yang dilakukan oleh rakyat kepada orang asing berlaku menurut undang-undang(Masyrullahushomad & Sudrajat, 2020).

Sebelum akhirnya *Agrarische Wet* ini disahkan terjadi perdebatan mengenai hak milik tanah (eigendom) yang di berikan kepada penduduk pribumi secara turun-temurun dengan tetap diberi batasan demi kepentingan umum. Beberapa anggota parlemen yang kurang setuju menganggap bahwa pemberian hak tanah ini dinilai kurang tepat bagi masyarakat Jawa dimana masih minim pemahaman hukum dan masih membutuhkan pengawasan negara serta dikhawatirkan bahwa hak milik tersebut akan membuat peluang bagi penduduk pribumi kehilangan tanahnya karena penjualan atau pegadaian kepada pihak asing yang nantinya akan memperburuk kondisi sosial ekonomi. Sebaliknya, anggota parlemen menganggap bahwa ketentuan ini sebagai bagian terpenting dari seluruh isi undang-undang karena dianggap akan menjadi kemajuan sosial dan mengintegrasikan masyarakat Jawa ke hukum modern dan mengenai penyewaan kepada pihak asing mayoritas juster melihat hal ini sebagai bentuk dari campur tangan perlindungan negara terhadap kepentingan penduduk pribumi. Kemudian, Undang-undang agraria disahkan pada 9 April 1870 *Agrarische Wet* telah disahkan (*De Locomotief*, 12 Februari 1870, n.d.).

### Mitos pribumi malas sebagai legitimasi kolonial



Gambar 1. Koran De Locomotief Edisi 21 Agustus 1866

Dalam buku karya Syed Hussein Alatas berjudul *The Myth Of The Lazy Native* menjelaskan bahwa citra "pribumi malas" termasuk orang Jawa, Melayu, dan Filipina dipahami bukanlah sebagai kenyataan yang sebenarnya melainkan mitos kolonial yang diciptakan untuk kepentingan ideologis. Mitos ini berfungsi sebagai doktrin moral yang membuktikan adanya relasi kekuasaan kolonial, khususnya di dalam praktik eksplorasi tenaga kerja melalui sistem tanam paksa. Dengan menggambarkan "kemalasan" sebagai sifat pribumi pemerintah kolonial membenarkan pemakaian kerja dengan berbagai kebijakan yang tidak adil (Alatas, 1977). Surat kabar *De Locomotief* juga memuat hal mengenai mitos pribumi yang malas dalam edisinya 21 Agustus 1868 yang berjudul "De luihed de Javanen" yang artinya "Kemalasan orang Jawa". Namun, alih-alih membuat ulang susunan mitos tersebut, artikel ini membingkainya sebagai susunan ideologis yang lahir dari cara pandang Eropa yang dangkal dan penuh prasangka. Kritik diarahkan kepada orang-orang Eropa terutama pejabat kolonial yang menilai orang Jawa tanpa mempertimbangkan kondisi struktural yang

melingkupinya, seperti kerja paksa, upah rendah, dan penindasan telah menghancurkan motivasi kerja rakyat. Penulis juga membandingkan prinsip yang ada di Eropa yaitu kerja itu sesuatu yang mulia dan pekerja layak mendapatkan upah, tetapi keadaan di Jawa kerja justru dipaksakan dan upah ditentukan sepihak oleh pemerintah dan tuan tanah kolonial. Penulis mengutip surat Raja Willem kepada Van den Bosch yang pada awalnya hanya mengizinkan kerja paksa sebagai hukuman kriminal bukan sebagai kebijakan umum. Rujukan ini digunakan untuk membuktikan bahwa praktik kerja buruh di Jawa telah melampaui batas dari kebijakan awal dan kemudian berubah menjadi eksplorasi terhadap penduduk yang bukanlah pelaku kejahatan (*De Locomotief*, 21 Agustus 1868, n.d.).

*"Hoe ? Men dwingt den Inlander te werken; men onthoudt hem een behoorlijk loon; men ontzegt hem een voldoenden waarborg van veiligheid voor het weinige geld, dat hij vermoogt te besparen; met schaadt het eergevoel; men kwetst het eigenbelang; men verstompt de scherpste prikkels tot den ar beid, en men ontziet zich niet, van gebrek aan werkzaamheid te spreken?"*

(Bagaimana? Orang memaksa penduduk asli untuk bekerja; mereka menahan upah yang layak; mereka menolak memberikan jaminan keamanan yang memadai untuk sedikit upah yang dapat mereka tabung; hal ini merusak rasa hormat; mereka melukai kepentingan pribadi; orang mematikan dorongan terkuat untuk bekerja, dan orang tidak segan-segan berbicara tentang kurangnya produktivitas?)

Sistem tanam paksa yang terus meluas dan beberapa jenis tanaman akhirnya dihapus, kebijakan tersebut sebenarnya bukan dilandasi adanya pertimbangan keadilan tetapi dikarenakan tanaman-tanaman tersebut sudah tidak memberikan keuntungan bagi kas negara. Upah bagi pekerja sangat rendah, sementara beban pajak dan kewajiban tanam paksa justru membuat mereka merugi. Hal ini menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari kebijakan kolonial bukan akibat dari sifat malas penduduk Jawa. Penulis secara tegas menolak bahwa anggapan orang Jawa malas. Sebaliknya, sebelum adanya campur tangan pemerintah kolonial, Masyarakat Jawa sendiri sudah membangun candi-candi yang membuktikan adanya keterampilan dan ketekunan masyarakat Jawa pada masa lampau. Dalam tulisan ini, orang Jawa dipandang akan mampu menjadi pekerja yang rajin apabila adanya kebebasan, keamanan, dan kesempatan untuk mengatur hidupnya sendiri, tanpa adanya tekanan dan paksaan pemerintah kolonial (*De Locomotief*, 21 Agustus 1868, n.d.).

### Perbandingan dengan pers kolonial lain

Sebagai perbandingan, surat kabar lain pada periode 1864-1870 menunjukkan orientasi pemberitaan yang berbeda yaitu *Soerabaijisch Handelsblad* dan *Java-Bode* tidak menempatkan isu buruh sebagai perhatian utama, melainkan lebih banyak memuat iklan, pengumuman resmi, serta informasi administratif yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah kolonial dan masyarakat Eropa. Absennya isu mengenai buruh dalam *Soerabaijisch Handelsblad* dan *Java-Bode* ini bisa dibaca sebagai strategi ideologis dimana menormalkan sistem kolonial dengan menyampingkan penderitaan buruh dari wacana publik dan adanya dominasi dari iklan serta laporan administratif berfungsi sebagai wacana yang cenderung stabilitas, keteraturan, dan sebagai kepentingan ekonomi kolonial (*Java-Bode*, 28 Desember 1864, n.d.).

Kecenderungan itu terlihat konsisten ketika edisi-edisi *Java-Bode* yang terbit berdekatan dengan edisi dari *De Locomotief* yang memberitakan mengenai buruh. Pada edisi 22 Juli 1865 (*Java-Bode*, 22 Juli 1865, n.d.) dan 16 Januari 1866 (*Java-Bode*, 16 Januari 1866, n.d.), *Java-Bode* tidak memberitakan tentang kondisi buruh di Jawa melainkan hanya memberitakan iklan, laporan resmi, telegram, berita luar negeri, serta informasi mengenai kapal dan penumpang yang tiba di Batavia. terjadi pola yang berulang pada edisi 19 Agustus 1868, *Java-Bode* kembali tidak memberitakan mengenai kondisi masyarakat di Jawa maupun isu mengenai buruh dan hanya fokus mengenai laporan administratif dan berita luar negeri (*Java-Bode*, 19 Agustus 1868, n.d.).

Sementara itu, *Soerabaijasch Handelsblad* memiliki beberapa keterbatasan selama periode penelitian ini. Surat kabar tersebut tidak keluar pada tahun 1864 dan baru keluar pada tahun 1865 dan memuat satu opini yang mengkritik pemerintah karena menghapus sistem *Cultuurstelsel* secara tiba-tiba dan skeptis mengenai undang-undang *Cultuurwet*. Bahkan terbitan *Soerabaijasch Handelsblad* tidak ada dari tahun 1866 hingga 1870, tetapi akhirnya kembali keluar pada tahun 1879. Keterbatasan waktu terbit ini juga menyebabkan sedikit diskusi tentang buruh. Akibatnya, fungsinya sebagai sarana untuk membandingkan masalah perburuhan menjadi terbatas (*Soerabaijasch Handelsblad*, 26 Desember 1865, n.d.).

Sesekali *Java-Bode* memuat kritik kepada kebijakan kolonial akan tetapi kritik tersebut tidak secara langsung untuk membahas kepentingan buruh. Terlihat pada edisi 21 Desember 1869 dimana *Java-Bode* memuat opini “*Denkbeelden over eene suikerregeling*” mengkritisi sistem perkebunan gula di Hindia-Belanda dimana membandingkan kondisi regulasi dan kritik terhadap Kamar Dagang Batavia dan Kamar Dagang Semarang dianggap mengabaikan petani Jawa dan lebih memprioritaskan industri gula. Tulisan ini secara tidak langsung memang mengkritisi pemerintah dan menyebutkan soal buruh akan tetapi ini kritik ini disebutkan untuk mengefisiensi industri dan juga pemerintah (*Java-Bode*, 21 Desember 1869, n.d.). Mulai tahun 1870 *Java-Bode* menjadi koran harian dan pada edisi yang sama dengan *De Locomotief* 12 Februari 1870 *Java-Bode* tidak memberitakan apapun mengenai kondisi buruh di Jawa dan hal-hal yang berkaitan mengenai buruh *Java-Bode* hanya memuat iklan, laporan keluarga, berita luar negeri Belanda dan laporan resmi pemerintah kolonial.

Dominasi *De Locomotief* dalam membahas isu buruh juga terlihat dari kuantitas pemberitaan. Berdasarkan penelusuran arsip digital *Delpher milik Koninklijke Bibliotheek* (Perpustakaan Nasional Belanda) dengan kata kunci “*koelie*” pada periode 1864–1870, *De Locomotief* memuat sebanyak 102 terbitan yang berkaitan dengan isu buruh. Jumlah ini menunjukkan bahwa persoalan perburuhan menjadi salah satu fokus utama redaksi surat kabar tersebut selama masa akhir tanam paksa. Secara ideologis, dominasi ini menegaskan bagaimana peran *De Locomotief* sebagai media yang secara intens membentuk dan menyebarkan wacana kritis terhadap kebijakan kolonial mengenai isu perburuhan.

**Tabel 1.** Terbitan Koran Yang Membahas Mengenai Buruh dengan Kata Kunci “Koelie” Tahun 1864-1870

No	Koran	Tahun	Jumlah
1.	<i>De Locomotief</i>	1864-1870	102 terbitan
2.	<i>Soerabaijasch Handelsblad</i>	1864-1870	1 terbitan
3.	<i>Java-Bode</i>	1864-1870	81 artikel

Sumber : arsip digital *Delpher milik Koninklijke Bibliotheek* (Perpustakaan Nasional Belanda)

## PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan surat kabar *De Locomotief* di periode 1864–1870 memposisikan dirinya sebagai surat kabar yang berbeda dibandingkan dengan media pers kolonial dalam membingkai mengenai isu buruh di Jawa. Perbedaannya bisa terlihat jelas baik secara intensitas berita, sudut pandang redaksi, maupun penyampaian kritik tajam terhadap pemerintah kolonial yang berdampak pada kondisi buruh.

Melalui artikel opini, kritik editorial, laporan. *De Locomotief* menekankan berbagai ketidakadilan yang dialami buruh Jawa, seperti upah tidak layak, pelanggaran kontrak kerja, eksploitasi pekerja, dan penderitaan sosial-ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial. Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis oleh Norman Fairclough, teks yang dimuat oleh *De Locomotief* menunjukkan relasi kuasa yang timpang antar pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi dan menyorot adanya upaya yang menggugat sistem tanam paksa yang sedang diperdebatkan pada masa tersebut.

Berbanding terbalik dengan koran sezamannya seperti *Java-Bode* isinya lebih memuat mengenai laporan resmi, iklan, perdagangan sedangkan isu buruh muncul sangat jarang dan kritik yang muncul. Pemberitaan *Soerabaijsch Handelsblad* sendiri menunjukkan keterbatasan pada periode terbit sehingga tidak memberikan pemberitaan mengenai isu buruh di Jawa masa akhir tanam paksa. Dengan demikian, Pembingkaian *De Locomotief* terhadap buruh di Jawa bukanlah suatu kebetulan. Hal ini menegaskan adanya keberpihakan dan posisi ideologisnya dalam konteks berkembangnya wacana liberal menjelang lahirnya kebijakan liberal yaitu *Agrarische Wet* 1870.

Sebagai prospek pengembangan, penelitian ini membuka peluang kajian yang berlanjut antara lain perbandingan pembingkaian buruh di antara pers kolonial dan pers bumiputera di periode berikutnya setelah *Agrarische Wet*, serta analisis terhadap respon pemerintah kolonial mengenai kritik media pers. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menambah studi mengenai sejarah pers kolonial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (1977). The myth of the lazy native: A study of the image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th century and its function in the ideology of colonial capitalism. P. Cass.
- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 119–134. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.465>
- Arizona, Y. (2014). Konstitutionalisme agraria. STPN Press.
- Chaniago, D. M., & Umairah, U. R. (2018). SEJARAH PERS KOLONIAL DI INDONESIA. Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.72>
- De Locomotief*, 2 Juli 1867. (n.d.).
- De Locomotief*, 12 Februari 1870. (n.d.).
- De Locomotief*, 16 Januari 1866. (n.d.).
- De Locomotief*, 21 Agustus 1868. (n.d.).
- De Locomotief*, 21 Desember 1869. (n.d.).
- De Locomotief*, 21 Juli 1865. (n.d.).
- De Locomotief*, 27 Desember 1864. (n.d.).
- Efendi, A. (2020). Perkembangan Pers di Indonesia. Alpin. <https://books.google.co.id/books?id=dNIAEAAAQBAJ>
- Eriyanto. (2001). Analisis wacana: Pengantar analisis teks media. LKiS Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books?id=cpDAPMAMimcC>
- Java-Bode*, 16 Januari 1866. (n.d.).
- Java-Bode*, 19 Agustus 1868. (n.d.).
- Java-Bode*, 21 Desember 1869. (n.d.).
- Java-Bode*, 22 Juli 1865. (n.d.).
- Java-Bode*, 28 Desember 1864. (n.d.).
- Kartodirdjo, S. (1993). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (S. Puspitasari, Ed.; Cet. 2). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Masyrullahushomad, M., & Sudrajat, S. (2020). Penerapan agrarische wet (undang-undang agraia) 1870: periode awal swastanisasi perkebunan di pulau jawa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045>
- Prof. Dr. Wasino, M.Hum, Dr. E. S. (n.d.). Metode penelitian sejarah: Dari riset hingga penulisan.
- Rakhmanto, B. (2018). Harian Rakjat “Mengangkat” Suara dari Bawah: Rubrik Asmu Menjawab dalam Pemberitaan Suara Petani Terkait Kasus Landreform 1961-1965. *Indonesian Historical Studies*, 2(1).

Soerabajasch Handelsblad, 26 Desember 1865. (n.d.).

Surjomihardjo, A. (1980). Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia. Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan R.I.  
<https://books.google.co.id/books?id=gDk4AAAAIAAJ>